

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum yang penting dalam rangka pembangunan hukum nasional yang menuju ke arah peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur kejiwaan hukum adat yang berintikan kepribadian bangsa Indonesia perlu dimasukkan ke dalam peraturan hukum baru agar hukum yang baru itu sesuai dengan dasar keadilan dan perasaan hukum masyarakat Indonesia.¹

Salah satu inti dari unsur-unsur hukum adat guna pembinaan hukum waris nasional adalah hukum waris adat. Untuk menemukan unsur-unsur dari hukum waris adat tersebut salah satunya dengan cara melakukan penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui persamaan dari berbagai sistem dan asas hukum waris adat yang terdapat di seluruh Nusantara ini yang dapat dijadikan titik temu dan kesamaannya dengan kesadaran hukum nasional sehingga apa yang dicitakan di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara bahwa untuk seluruh wilayah Republik Indonesia hanya ada satu sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.²

¹M. M, Djodjodigono, *Asas-Asas Hukum Adat* (Jogyakarta: Yayasan Badan Penerbit GAMA. 1958), hlm 6.

² Hilman Hadikusumo, **Hukum Waris Adat**, (Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 1993), hlm. 23.

Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat pluralistis, yaitu ada yang tunduk kepada hukum waris dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat. Masyarakat Indonesia berbhineka yang terdiri dari beragam suku bangsa memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam antara yang satu dengan yang lainnya berbeda dan memiliki karakteristik tersendiri yang menjadikan hukum adat termasuk di dalamnya hukum waris menjadi pluralistis pula. Mengingat bahwa Negara Indonesia menggunakan sistem hukum yang lebih dari satu di dalam kehidupan sosial, maka dalam hukum waris yang dianut bermacam-macam pula sistemnya. Sistem hukum waris tersebut meliputi dari sistem kekerabatan yang terdiri dari patrilineal dan matrilineal dan atau sistem parental atau bilateral.³

Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Secara teoritis sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan atas tiga corak, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral. Sistem keturunan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum

³ Fauzi, M. Y. Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia. Jurnal Pengembangan Masyarakat. Vol. 9. No. 2. 2016 hlm .53-75

kewarisan, disamping itu juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan.⁴

Secara umum, hukum waris adat memiliki beberapa sistem dalam pewarisannya. Sistem tersebut terdiri dari 3 (tiga) macam yakni sistem pewarisan individual, sistem pewarisan kolektif dan sistem pewarisan mayorat. Sistem pewarisan individual adalah setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu dibagi maka masing-masing ahli waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama ahli waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain. Sistem pewarisan kolektif adalah sistem pewarisan dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Bagaimana cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing ahli waris diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan di bawah bimbingan kerabat. Sistem mayorat adalah sistem pembagian waris bagi anak yang tertua atau anak pertama yang akan menjadi pengganti kepala keluarga. Sistem

⁴Soekamto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia* (Jakarta : Soeroengsan. 1955), hlm. 73.

pewarisan mayorat terbagi menjadi 2 (dua) yakni mayorat laki-laki dan mayorat perempuan.

Hukum waris adat pada dasarnya memiliki asas didalamnya. Asas tersebut dipergunakan sebagai dasar atau sebagai petunjuk arah dalam pelaksanaannya. Asas –asas tersebut terdiri dari berbagai bentuk yang meliputi asas ketuhanan dan pengendalian diri, asas kesamaan dan kebersamaan hak, asas kerukunan dan kekeluargaan, asas musyawarah dan mufakat, serta asas keadilan. Hukum waris adat memiliki warna dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum Barat. Bangsa Indonesia yang murni dalam berfikir berasas kekeluargaan, yaitu kepentingan hidup yang rukun damai lebih diutamakan dari pada sifat-sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri.⁵

Salah satu suku yang ada di wilayah Timur di Propinsi Jawa Timur adalah suku Osing. Suku Osing adalah penduduk asli Banyuwangi dan merupakan penduduk mayoritas di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Bahasa asli yang dimiliki adalah bahasa Osing yang merupakan turunan langsung dari Bahasa Jawa Kuno seperti halnya Bahasa Bali. Bahasa Osing sangat berbeda dengan Bahasa Jawa sehingga bahasa Osing bukan merupakan dialek dari bahasa Jawa seperti umumnya. Suku Osing menempati beberapa kecamatan di kabupaten Banyuwangi bagian tengah dan bagian utara,

⁵ Hakim, M. L. Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 3. No.2. 2012

terutama di Kecamatan Banyuwangi, Kecamatan Rogojampi, Kecamatan Glagah dan Kecamatan Singojuruh, Kecamatan Giri, Kecamatan Kalipuro, dan Kecamatan Songgon.

Masyarakat adat osing yang menempati wilayah Desa Olehsari Kecamatan Glagah Banyuwangi yang memiliki adat dan hukum adat sendiri dengan sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal. Matrilineal adalah suatu masyarakat adat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu. Keadaan tersebut memberikan arti bahwa mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu. Untuk mengetahui sistem hukum adat masyarakat osing dengan sistem kekerabatan yang matrilineal dan isi masyarakatnya 99% tidak beragama pada umumnya, peristiwa ini perlu diadakan penelitian dengan cermat agar diketahui secara benar tentang hukum waris adat masyarakat osing yang meliputi dari sistem ahli waris, obyek waris, serta waktu harta waris itu akan dibagi-bagikan, serta proses pembagian harta waris itu dilakukan, serta maksud dan tujuan dari sistem pembagian harta waris yang dianutnya.⁶

Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia kini dan masa yang akan datang di dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 maka

⁶ Jamil, R. Hukum Waris Dan Wasiat (Sebuah perbandingan antara Pemikiran Hazairin dan Munawwir Sjadzali). Al- Ahwal. Vol. 10. No. 1. 2017. hlm.98-114

untuk menyusun hukum nasional diperlukan adanya konsepsi dan asas-asas hukum yang berasal dari hukum adat.⁷

Berdasarkan gambaran permasalahan di atas, hal ini telah mendorong penulis untuk mengkajinya ke dalam penelitian skripsi dengan judul: “HUKUM WARIS ADAT SUKU OSING (Studi Kasus Di Masyarakat Adat Osing Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)”

Salah satu suku yang ada di wilayah Timur di Propinsi Jawa Timur adalah suku Osing. Suku Osing adalah penduduk asli Banyuwangi dan merupakan penduduk mayoritas di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Bahasa asli yang dimiliki adalah bahasa Osing yang merupakan turunan langsung dari Bahasa Jawa Kuno seperti halnya Bahasa Bali. Bahasa Osing sangat berbeda dengan Bahasa Jawa sehingga bahasa Osing bukan merupakan dialek dari bahasa Jawa seperti umumnya. Suku Osing menempati beberapa kecamatan di kabupaten Banyuwangi bagian tengah dan bagian utara, terutama di Kecamatan Banyuwangi, Kecamatan Rogojampi, Kecamatan Glagah dan Kecamatan Singojuruh, Kecamatan Giri, Kecamatan Kalipuro, dan Kecamatan Songgon.

Masyarakat adat osing yang menempati wilayah Kecamatan Glagah Banyuwangi yang memiliki adat dan hukum adat sendiri dengan sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal. Matrilineal adalah suatu masyarakat adat

⁷ Hilman Hadikusumo, **Hukum Waris Indonesia, Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Hukum Islam**, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1994), hlm. 1.

yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu.⁸ Keadaan tersebut memberikan arti bahwa mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu. Untuk mengetahui sistem hukum adat masyarakat osing dengan sistem kekerabatan yang matrilineal dan isi masyarakatnya 99% tidak beragama pada umumnya, peristiwa ini perlu diadakan penelitian dengan cermat agar diketahui secara benar tentang hukum waris adat masyarakat osing yang meliputi dari sistem ahli waris, obyek waris, serta waktu harta waris itu akan dibagi-bagikan, serta proses pembagian harta waris itu dilakukan, serta maksud dan tujuan dari sistem pembagian harta waris yang dianutnya.⁹

Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia kini dan masa yang akan datang di dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 maka untuk menyusun hukum nasional diperlukan adanya konsepsi dan asas-asas hukum yang berasal dari hukum adat.¹⁰

Berdasarkan gambaran permasalahan di atas, hal ini telah mendorong penulis untuk mengkajinya ke dalam penelitian skripsi dengan judul: “HUKUM WARIS ADAT SUKU OSING (Studi Kasus Di Masyarakat Adat Osing Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)”

⁸ Muhibbuddin, M. Pembaruan Hukum Waris Islam Di Indonesia. AHKAM. Volume 3. No. 2. 2015. hlm. 187-197

⁹ H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1993), hlm. 23.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, **Hukum Waris Indonesia, Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Hukum Islam**, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1994), hlm. 1.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sistem perkawinan Masyarakat Adat Suku Osing di Desa Olehsari Kabupaten Banyuwangi yang akan mempengaruhi sistem pewarisanya?
2. Bagaimanakah bentuk sistem dan asas-asas pewarisan dalam Masyarakat Adat Suku Osing di Desa Olehsari Kabupaten Banyuwangi?
3. Apa sajakah bentuk dari harta waris dan bagaimana proses pembagiannya?
4. Siapa saja yang dapat sebagai pewaris dan ahli waris dalam pewarisan Masyarakat Adat Suku Osing di Desa Olehsari Kabupaten Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem Perkawinan Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui sistem dan asas-asas pewarisan dalam masyarakat adat suku Osing Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.
3. Untuk mengetahui bentuk harta waris masyarakat adat osing di Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.
4. Untuk mengetahui siapa saja yang dapat sebagai pewaris dan ahli waris dalam masyarakat Adat Suku Osing Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu:

1. **Bagi Penulis**

Penelitian ini selain dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan baru untuk penulis terkait hukum waris adat khususnya hukum waris adat osing. Di samping itu, manfaat penelitian secara subyektif yaitu sebagai syarat untuk Penulisan Tugas Akhir dan menyelesaikan studi Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan gelar Sarjana Hukum.

2. **Bagi Mahasiswa**

Memberikan tambahan pengetahuan mengenai konsep-konsep pewarisan yang terjadi dalam hukum waris adat khususnya hukum waris adat masyarakat adat osing.

3. **Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh informasi yang utuh terkait dengan hukum waris adat khususnya hukum waris masyarakat adat osing.

4. **Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah dalam rangka menata kembali penyelenggaraan peraturan-peraturan terkait melindungi hak-hak

masyarakat adat dalam hal mewaris khususnya masyarakat adat osing di Banyuwangi.

E. Kegunaan Penelitian

Sementara itu adapun kegunaan yang diharapkan penulis yaitu, tulisan ini dapat menjadi referensi dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang Hukum Waris Adat. Selain itu, diharapkan juga hasil penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kalangan praktisi maupun teoritis hukum serta bagi masyarakat pada umumnya.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan masalah dengan cara meninjau peraturan – peraturan yang telah diberlakukan dalam masyarakat sebagai hukum positif dengan peraturan pelaksanaannya termasuk implementasinya di lapangan. Penulis juga akan mengidentifikasi hukum tidak tertulis di masyarakat adat tersebut khususnya hukum waris adat yang berlaku pada masyarakat suku Osing di Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi . Dalam hal ini masyarakat adat merupakan objek penelitian yang dilakukan oleh penulis.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Olehsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dengan alasan peneliti ingin mencari tau bagaimana Sistem pewarisan di masyarakat adat Suku Osing tersebut apakah telah sesuai dengan hukum positif yang ada atau masih menerapkan hukum adat mereka. Dari desa Olehsari yang berada di kecamatan Glagah kabupaten Banyuwangi ini terdiri dari dua dusun yaitu dusun joyosari dan dusun krajan masing-masing dusun yang berada di Desa Olehsari ini di huni oleh Suku Osing disini penulis akan mengambil 5 (lima) orang responden dari desa tersebut di atas untuk mendukung data penelitian ini maka penulis mengadakan wawancara (interview) yang bersifat bebas terpimpin kepada responden yang lain sebanyak 5 (orang) tokoh masyarakat sebagaimana sumber yang dinilai mampu memberikan pandangan mengenai suatu kajian tentang hukum waris adat masyarakat osing Banyuwangi menurut pengamatan penulis.

Di dalam wawancara yang bersifat bebas ini penulis akan mewawancarai yaitu Kepala desa Olehsari, Pemangku adat suku Osing di desa Olehsari, Masyarakat yang melakukan Waris (Pewaris) ,Ahli Waris, dan juga saksi waris. Keunikan dari desa Olehsari ini yaitu di setiap malam minggu ada wisata kuliner khas suku Osing yaitu berupa makanan khasnya dengan nama kupat lodoh yang biasanya hanya ada saat hari raya ,namun di desa olehsari ini ada setiap malam minggu di sepanjang jalan desa olehsari ini, dan kadang masyarakat desa olehsari ini setiap malam minggu di dalam festival makanan

khass Suku Osing ini mereka juga melakukan pertunjukan tarian khasnya yaitu tari Gandrung.

3. Sumber Data Hukum

Sumber data hukum adalah sumber data hukum yang digunakan untuk melengkapi data penelitian. Sumber data hukum meliputi, sumber data hukum primer, sumber data hukum sekunder, dan sumber data hukum tersier. Adapun sumber data hukum tersebut yaitu:

a. Data Hukum Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui observasi / pengamatan, interview / wawancara dan kuesioner / angket. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara kuesioner terhadap responden yang telah ditentukan di samping melakukan wawancara (interview) terhadap nara sumber yang berhubungan dengan penelitian, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, baik yang terdapat dalam wawancara (interview) maupun angket telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi dalam wawancara dimungkinkan timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan kondisi saat langsung wawancara.

b. Data Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dilakukan sebagai langkah awal untuk memperoleh bahan acuan untuk penulisan skripsi ini, yaitu¹¹:

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, **Penelitian Hukum Normatif**, (Jakarta, raja Grafindo Persada), 2001, hlm.

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari nomor dasar, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD RI) 1945, Perundang-undangan dan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum Adat dan Yurisprudensi.
- b) Bahan hukum sekunder yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti ketentuan-ketentuan dan komentar mengenai hukum waris adat, jurnal maupun buku-buku petunjuk lain yang memberikan kejelasan terhadap penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus ensiklopedia, indeks komulatif.

c. Data Hukum Tersier

Data hukum tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum primer dan data hukum sekunder yaitu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

G. Teknik Pengumpulan Data Hukum

a. Wawancara

Wawancara penelitian adalah suatu metode penelitian yang meliputi pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara pewawancara dan responden atau narasumber yang mengetahui permasalahan maupun yang terlibat langsung dalam masalah (tokoh adat). Wawancara dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian yaitu

untuk mengetahui perkembangan pewarisan adat suku Osing di Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi tersebut.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri bahan bacaan baik berupa jurnal, buku, peraturan perundang-undangan terkait dengan hukum adat masyarakat Samin, dan bahan bacaan lain yang dapat memberikan dukungan teori terkait pewarisan adat Suku Osing Banyuwangi.

H. Analisis Data Hukum

Suatu data yang telah dikumpulkan dan diperoleh baik dari data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau responden dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan” serta semua informasi yang didapatkan dianalisis secara kualitatif”, yaitu dengan menggunakan data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya ditafsirkan atau diimplementasikan untuk menjawab permasalahan.

I. Sistematika Penulisan

Pada penulisan ini, penulis akan menyajikan empat bab yang terdiri dari sub-sub bab, sistematika penulisannya secara singkat adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat hal-hal yang melatarbelakangi pemilihan topik dari penulisan skripsi dan sekaligus menjadi

pengantar umum dalam memahami penulisan secara keseluruhan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, mafaat penulisan. Kegunaan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II ini penulisan akan menguraikan landasan teori atau kajian teori yang mendukung hasil penelitian dalam membahas permasalahan yang diperoleh oleh penulis, yakni Hukum Kekrabatan, Hukum Perkawinan, Hukum Waris.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jawaban terhadap permasalahan yang berhubungan dengan objek yang diteliti yakni: Hukum Waris Adat Osing yang meliputi dari proses mekanisme pewarisan hingga landasan asas-asas yang menjadi acuan dalam pewarisan tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir atau penutup yang didalam nya berisikan suatu kesimpulan dari hasil penelitian hukum.